

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan faktor utama didalam proses pengambilan keputusan, agar keputusan yang dihasilkan pimpinan lebih tepat dan terpadu, maka haruslah didukung dengan tersedianya informasi yang benar dan jelas serta relevan. Informasi saat ini merupakan salah satu faktor produksi yang penting sehingga semakin besar perhatian yang dicurahkan untuk menghasilkan arus informasi yang tepat dan relevan, agar dapat bermanfaat bagi pimpinan didalam organisasi perusahaan dalam menunjang proses pengambilan keputusan yang terpadu. (Kadir, 2003:31)

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan sebenarnya. Efektivitas merupakan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Informasi yang dibahas adalah prosedur pelaksanaan PKBL yang terlaksana secara sistem sehingga memberikan gambaran data atau informasi secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan. Batasan yang dibahas adalah prosedur pelaksanaan PKBL terlaksana secara tercatat atau terekam. (Mulyamah. 1984:3), (Hidayat, 1986:35)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dan sedang menata pembangunan di segala bidang, dimana salah satu bidang

pembangunan yang saat ini ditata adalah bidang pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan ini merupakan suatu kegiatan usaha yang lebih menekankan kepada pembangunan atau pengembangan terhadap sektor usaha kecil dan usaha menengah dalam rangka meningkatkan potensi usahanya secara optimal guna menciptakan perluasan lapangan kerja agar mampu memberikan kontribusi pendapatan kepada Negara Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk membantu mengedukasi, mengawasi dan menentukan kebijakan yang tepat kepada sasarannya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa instansi pemerintah seperti dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas tenaga kerja dan lain-lain.

PT. Superintending Company of Indonesia (Persero), dikenal dengan sebutan SUCOFINDO merupakan perseroan terbatas milik negara yang berpengalaman dibidang inspeksi, supervisi, pengkajian dan pengujian. Selain berpengalaman dalam bidang jasanya, semenjak tahun 1992 hingga saat ini, SUCOFINDO juga telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). (Graha Sucofindo, 2003:1)

Sebagai salah satu BUMN yang mengemban misi pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi kerakyatan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, memperluas lapangan/kesempatan kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,